

KATA PENGANTAR

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

RENSTRA Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar ini merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dengan ruang lingkup mencakup: tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, tahun 2016 – 2021.

Renstra Tahun ini diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh bidang di lingkungan Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar .

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
	2.2. Sumber Daya
	2.3. Kinerja Pelayanan
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bab V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	PENUTUP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara dan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, industri, perdagangan, pasar dan pertambangan dan energi berdasarkan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar sebagai perencanaan awal yang didasari oleh pola pikir logis dan partisipasi masyarakat yang disusun secara sistematis sehingga dapat dianalisa dan menitik beratkan pada perencanaan efektif dan efisien dengan menggunakan Analisa Swot dan metode perencanaan lainnya yang masih relevan dengan metode sistem perencanaan nasional dewasa ini.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar 2016-2021 ini berdasarkan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah .
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme .

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- i. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- j. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- k. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) adalah untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa depan, guna mencapai tujuan yang diinginkan yang disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperindag Tahun 2016 – 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam pelaksanaan urusan Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM, Industri dan Perdagangan.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja OPD atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I	PENDAHULUAN
	1.5. Latar Belakang
	1.6. Landasan Hukum
	1.7. Maksud dan Tujuan
	1.8. Sistematika Penulisan
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
	2.6. Sumber Daya
	2.7. Kinerja Pelayanan
	2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
	3.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.8 Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bab V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas Dan Fungsi

Sebagai mana Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor : ... Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

A. Dinas :

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- d. pelaporan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

D. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang data, standarisasi dan pengawasan, industri agro dan industri non agro;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang data, standarisasi dan pengawasan, industri agro dan industri non agro;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang data, standarisasi dan pengawasan, industri agro dan industri non agro;
 - d. pelaporan di bidang data, standarisasi dan pengawasan, industri agro dan industri non agro; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan;
- e. pelaporan di bidang bina usaha dan sarana, pengembangan dan promosi serta pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah , Struktur Organisasi Dinas Koperindag adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Data, Standarisasi dan Pengawasan;
 2. Seksi Industri Agro; dan
 3. Seksi Industri Non Agro.
- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
 2. Seksi Pengembangan dan Promosi; dan
 3. Seksi Pengawasan.

- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

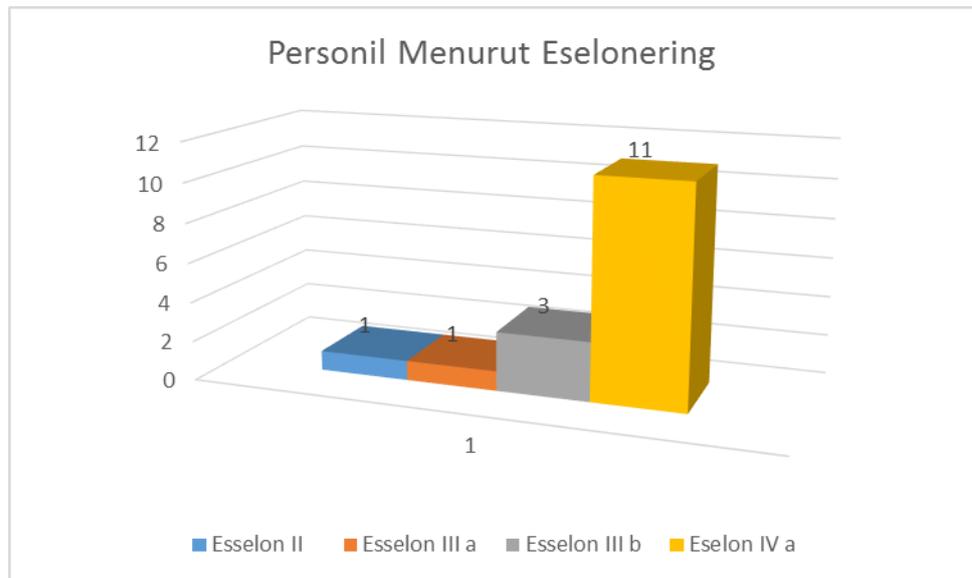
2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan

Kepegawaian

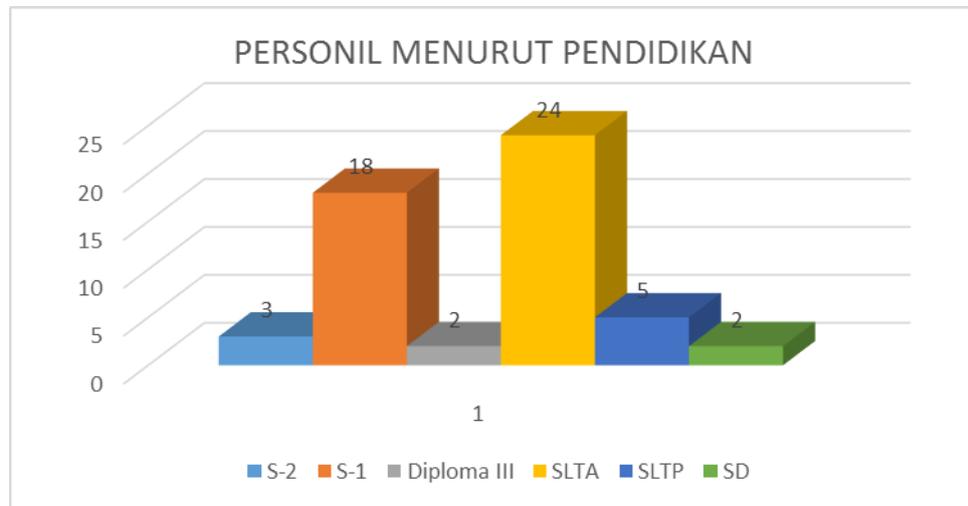
Jumlah pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar 54 orang (PNS) sebagai berikut :

- a. Personil menurut Jabatan Struktural sebagai berikut :
 - Esselon II : 1 orang
 - Esselon III a : 1 orang
 - Esselon III b : 3 orang
 - Eselon IV a : 11 orang



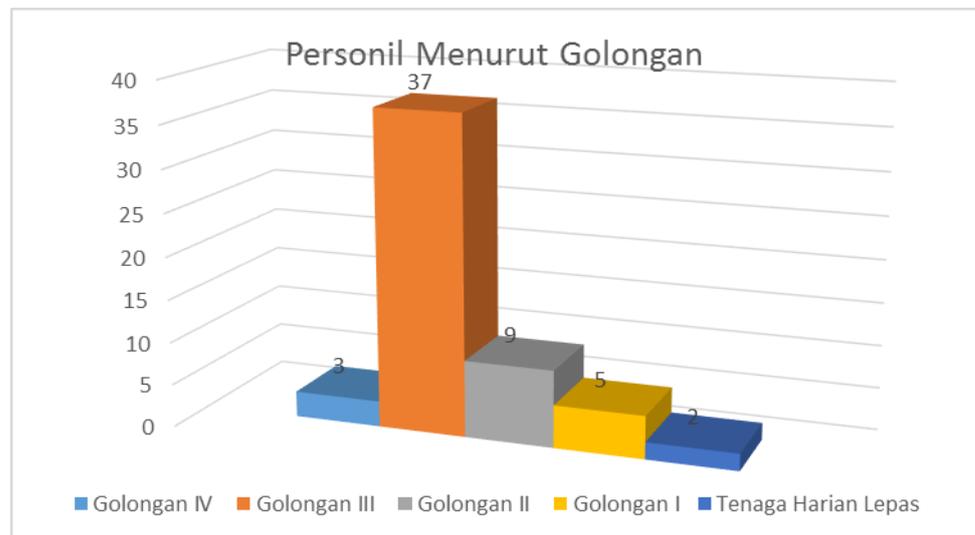
- b. Personil menurut pendidikan sebagai berikut :

- S-2 : 3 orang
- S-1 : 18 orang
- Diploma III : 2 orang
- SLTA : 24 orang
- SLTP : 5 orang
- SD : 2 orang



c. Namun bila dilihat dari pangkat/golongan ruang dikelompokkan sebagai berikut :

- Golongan IV : 3 orang
- Golongan III : 37 orang
- Golongan II : 9 orang
- Golongan I : 5 orang
- Tenaga Harian Lepas : 2 orang



Perlengkapan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dimana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperindag adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan

- 1) Kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit yang dimanfaatkan oleh :
 - 1 (satu) unit Kepala Dinas (BA 27 E)
 - 1 (satu) unit Bidang Koperasi dan UKM (BA 107E)
 - 1 (satu) unit Bidang Perindustrian (BA 1529 E)
 - 1 (satu) unit Sekretariat (BA 75 E)
 - 1 (Satu) unit Bidang Perdagangan (BA 8607E)
 - 1 (Satu) unit Bidang Pasar (BA 46 E)
 -
- 2) Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit dengan kondisi 4 unit baik, 2 unit rusak, dimanfaatkan sebagai berikut :
 - 4 (empat) unit pada Sekretariat
 - 2 (tiga) unit pada Bidang Koperasi dan UKM

b. Peralatan Mekanik

- Komputer sebanyak 15 unit
- Printer sebanyak 8 unit
- Mesin ketik manual sebanyak 6 unit
- Telepon sebanyak 2 unit
- WireLess sebanyak 1 unit
- Faximile sebanyak 1 unit
- Kamera digital 4 buah
- Perlengkapan kerja (meja, kursi, lemari,dll)
- Produk contoh industry

2.3 KINERJA PELAYANAN

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang utama berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu :

1. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2. Urusan Perdagangan; dan
3. Uruasn Perindustrian

Berikut ini digambarkan tentang kinerja pelayanan OPD berdasarkan capaian Kinerja Renstra periode 2010-2015 :

Dari Tabel Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Datar 2010-2015 tidak adanya kesenjangan terhadap Rencana pembangunan Jangka Menengah yang diberikan. Untuk beberapa pelayan pencapaian rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanah Datar di lihat dari rasio pencapaian dari tahun 2010-2015 untuk lembaga ekonomi koperasi dan UKM sudah di atas 80%, dimana keberhasilan ini di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya jumlah koperasi aktif yang dapat dilihat dari tingkat volume usaha koperasi, aset koperasi dan Tupoksi pembagian SHU (Sisa hasil Usaha) dari koperasi yang dibina. Keberhasilan juga dapat di lihat dari UKM Binaan yang menunjukkan Realisasi capaian dari tahun 2010-2015 yang mengalami progres peningkatan dalam pembinaan yang diberikan seperti aspek manajemen usaha, pemasaran, pembukuan dan aspek wirausaha pemula. Untuk pengembangan industri kecil dan menengah tidak adanya juga kesenjangan dalam rencana pembangunan jangka menengah tetapi keberhasilan yang telah tercapai di atas 100%, keberhasilan ini di pengaruhi oleh faktor banyaknya IKM daerah yang telah memiliki izin Usaha baik dari segi halal, sertifikat Haki yang di berikan ke IKM serta produk IKM telah memiliki standarisasi yang tinggi.

3.1.1. Kinerja Organisasi

Untuk keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung dengan kualitas dan kompetensi dari aparatur yang ada dalam organisasi tersebut

Selama kurun waktu lima tahun dari 2010-2015 sesuai dengan periode Renstra Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar dirasakan belum optimalnya kinerja organisasi, hal ini sangat tergantung kepada beberapa hal antara lain :

- a Kualitas dan kuantitas aparatur Dinas Koperindag yang telah mengikuti diklat, baik teknis maupun administratif.
- b Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Koperindag belum memadai.
- c Jumlah pegawai belum sebanding dengan beban kerja.

3.1.2. Pengembangan Koperasi dan UKM

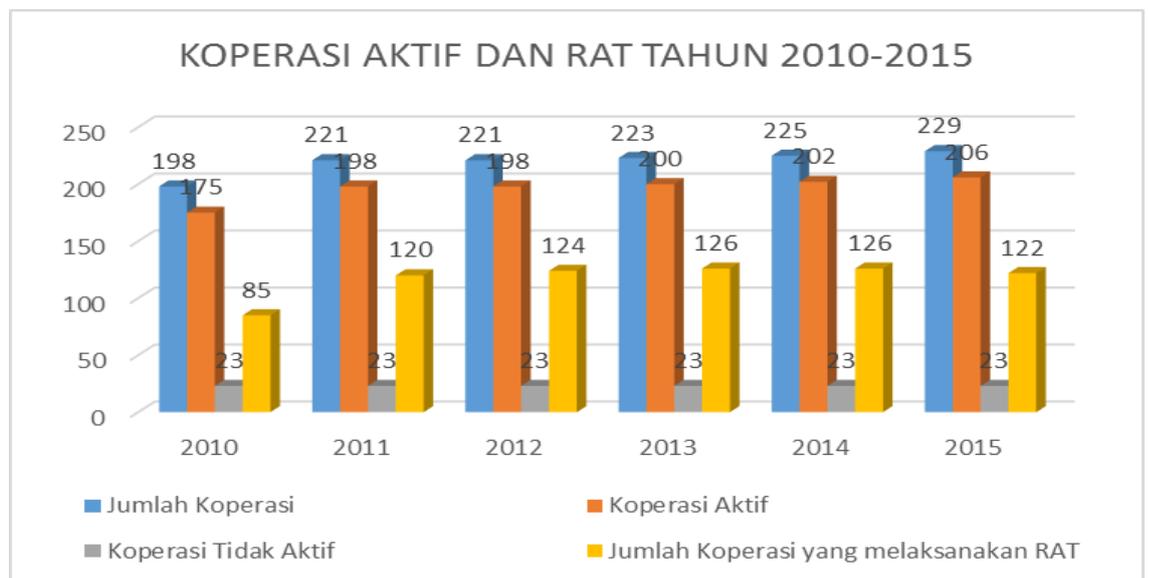
Koperasi merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk berusaha secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan modal dan aset yang dimiliki, kegiatan dan usaha koperasi diarahkan kepada pencapaian

peningkatan keuntungan/laba dari volume usaha yang dijalankan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tanah Datar (2010-2015) adalah sebagai berikut :

**Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010-2015**

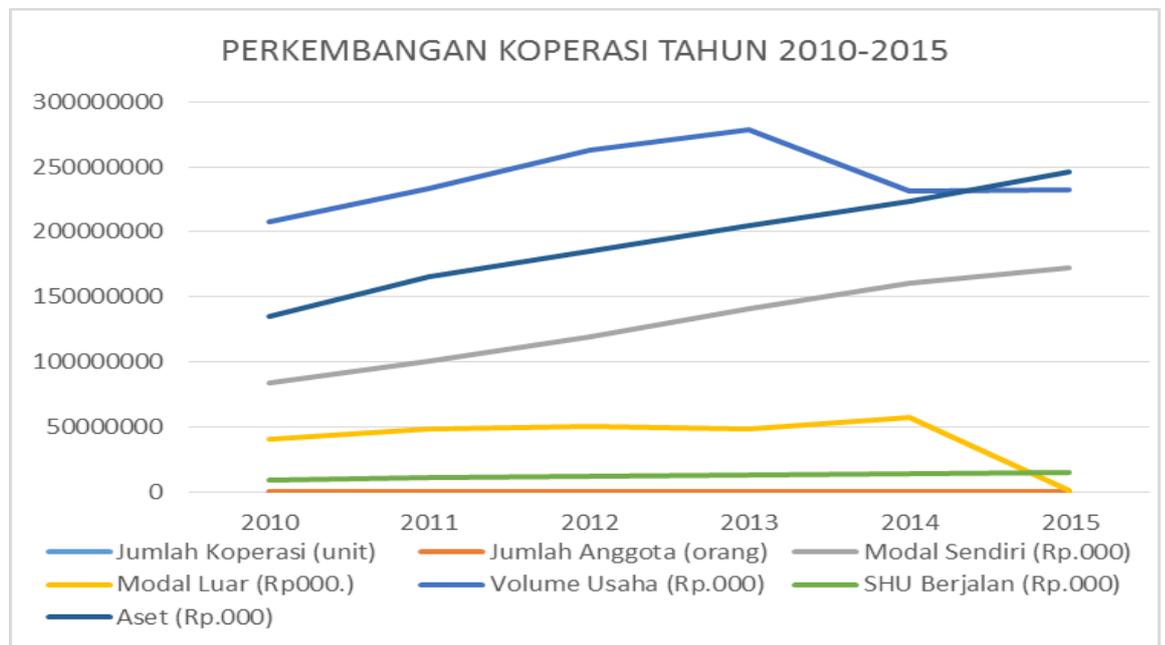
No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Koperasi	198	221	221	223	225	229
2.	Koperasi Aktif	175	198	198	200	202	206
3.	Koperasi Tidak Aktif	23	23	23	23	23	23
4.	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	85	120	124	126	126	122



Adapun perkembangan keragaan koperasi tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perkembangan Keragaan Koperasi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015

N O	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Koperasi (unit)	198	221	221	223	225	229
2	Jumlah Anggota (orang)	33.338	40.339	41.641	43.148	38.835	39.110
3	Modal Sendiri (Rp.000)	83.983.720	100.813.000	118.845.000	141.332.884	160.273.400	172.299.400
4	Modal Luar (Rp000.)	40.919.450	48.780.000	50.522.000	48.571.463	57.058.100	1.669.700
5	Volume Usaha (Rp.000)	208.258.629	233.350.000	262.738.000	278.393.251	231.795.300	232.266.700
6	SHU Berjalan (Rp.000)	9.467.775	11.122.000	12.446.000	13.604.589	14.577.000	15.567.900
7	Aset (Rp.000)	134.953.983	165.801.000	185.301.000	205.053.315	223.185.600	246.571.300



Penilaian Klasifikasi Koperasi Tahun 2010-2015

No	Tahun	Predikat		
		A	B	C
1	2010	6	44	0

2	2011	12	69	2
3	2012	10	64	6
4	2013	12	38	0
5	2014	8	53	3
6	2015	0	15	72

Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi Tahun 2010-2015

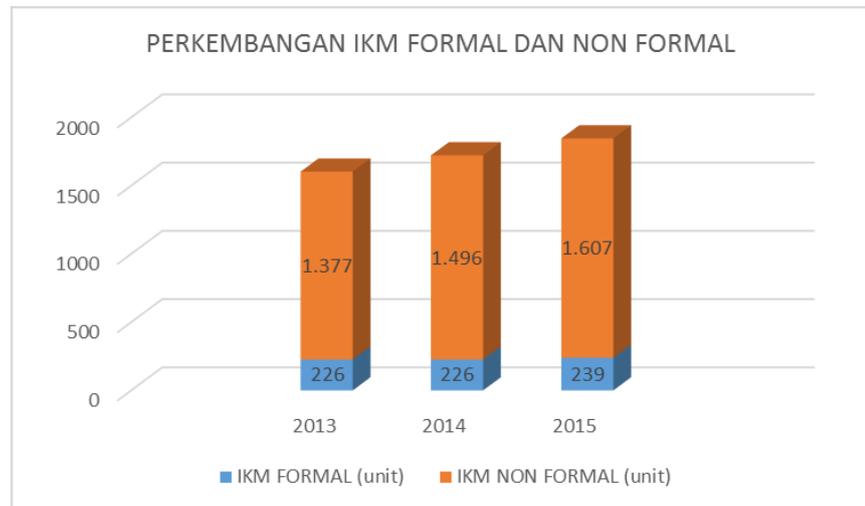
No	Tahun	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat
1	2010	47	10	3
2	2011	57	16	3
3	2012	57	23	5
4	2013	61	21	3
5	2014	55	8	1
6	2015	5	50	14

Permasalahan :

- Masih belum optimalnya perkembangan koperasi dan UMKM, disebabkan oleh berbagai permasalahan antara lain : masih rendahnya citra koperasi dimata masyarakat, rendahnya penerapan aturan-aturan, lemahnya ketrampilan pengelola koperasi, balas jasa pengelola yang belum memadai sehingga fungsi manajemen belum berjalan dengan optimal.
- Masih rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi
- Masih kurangnya akses masyarakat dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan formal disebabkan ketidakmampuan koperasi menyediakan persyaratan teknis perbankan diantaranya penyediaan jaminan.

3.1.3. Perkembangan Industri

Semenjak 5 (Lima) tahun terakhir pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor industri di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan perkembangan yang meningkat dan signifikan, seperti terlihat pada Tabel berikut.



**Data Industri Formal
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2014**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Unit Usaha (unit)	639	653	653	226	226
2.	Tenaga Kerja (orang)	2.539	2.539	2.539	842	842
3.	Nilai Investasi (Rp,-)	13.731.984.050	34.835.899.000	34.835.899.000	43.256.571.000	43.256.571.000

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar

**Tabel 1.28
Perkembangan Industri Non Formal
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2014**

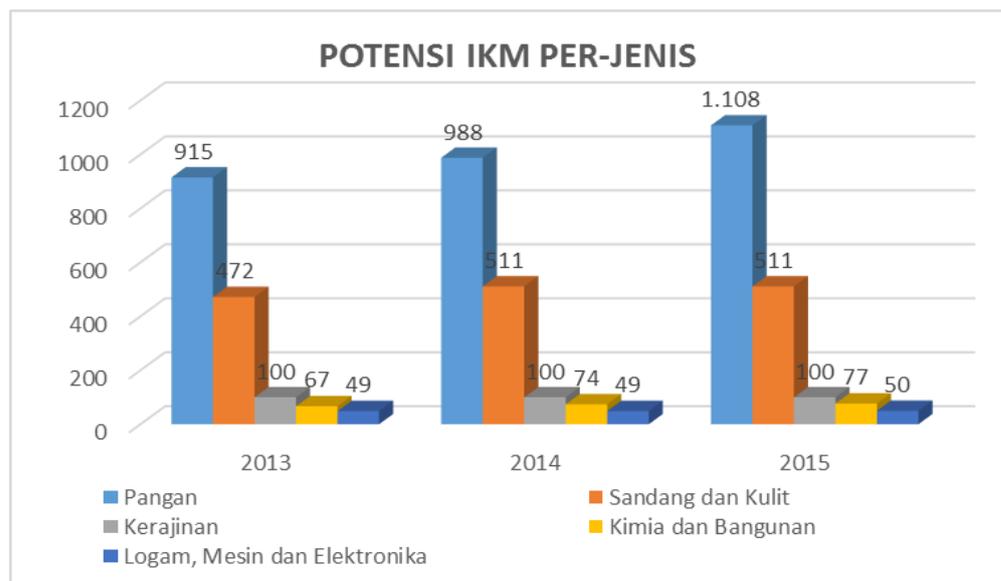
No	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014*
1.	Unit Usaha (unit)	7.619	7.687	7.687	1.377	1.496
2.	Tenaga Kerja (orang)	17.894	18.030	17.894	3.588	3.933
3.	Nilai Investasi (Rp,-)	9.304.590.000	14.456.850.000	14.456.850.000	42.703.902.000	43.430.759.000

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar

Keterangan : * koreksi data hasil pendataan ulang

**DATA POTENSI IKM PER-SEKTOR KAB. TANAH DATAR
2013-2015**

No.	Jenis Industri	2013	2014	2015	%
1.	Pangan	915	988	1.108	12,15
2.	Sandang dan Kulit	472	511	511	0
3.	Kerajinan	100	100	100	0
4.	Kimia dan Bangunan	67	74	77	4,05
5.	Logam, Mesin dan Elektronika	49	49	50	2,04
Jumlah		1.603	1.722	1.846	7,20



Selanjutnya juga dapat dilihat perkembangan perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Industri (TDI) dan jumlah industri menengah, seperti pada tabel berikut:

**Jumlah Penerbitan TDI/Izin Usaha Industri
di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2014**

No	Tahun	Penerbitan
1	2010	57
2	2011	38

3	2012	19
4	2013	14
5	2014	14

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar

Permasalahan :

- Masih rendahnya daya saing produk IKM utama disebabkan oleh :
 - a. Kualitas belum standar, dimana kualitas yang dihasilkan belum merata selalu berubah.
 - b. Packing produk belum baik.
 - c. Modal belum mencukupi untuk pengadaan produk sesuai dengan permintaan pasar
 - d. Sebagian produksi masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana

3.1.4. Perkembangan Perdagangan

Jumlah Penerbitan SIUP di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2014

No	Klasifikasi Perusahaan	Penerbitan				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Perdagangan Besar	7	1	-	-	-
2.	Perdagangan Menengah	18	29	31	36	26
3.	Perdagangan Kecil	374	387	307	355	313
4.	Perdagangan Mikro	-	47	106	144	79
Jumlah			399	464	444	418

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Data Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Perusahaan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2014

No	Klasifikasi Perusahaan	Pendaftaran				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	PT	25	22	27	25	21
2.	CV	72	124	93	98	93

3.	PO (Perusahaan Perorangan)	380	10	398	364	298
4.	Koperasi	7	408	7	3	8
5.	Badan Usaha Lainnya	-	1	2	5	8
Jumlah		484	565	527	495	428

Sumber : KPPT Kabupaten Tanah Datar

3.1.5. Perkembangan Pasar

Permasalahan :

- Masih kurangnya kualitas sarana perdagangan
- Kurangnya promosi produk unggulan daerah
- Permasalahan distribusi barang yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran barang dan jasa
- Kurang optimalnya fungsi pasar-pasar tradisional yang ada yang disebabkan oleh administrasi pengelolaan yang kurang baik.

No.	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	POPULASI WILAYAH (ORANG)	JUMLAH PEDAGANG (ORANG)	KONDISI BANGUNAN PASAR			KOMODIT I UTAMA	USIA PASAR (Tahun)
					Berat	Sedang	Ringan		
1	2	3	4	5	11	12	13	17	18
I	KECAMATAN X KOTO	152.02	42,329	693		2	1		
1	Nagari : Paninjauan								
	Nama Pasar : Pasar Raba'a			125		1		Bahan Pokok	65
2	Nagari : Koto Baru								
	Nama Pasar : Pasar Koto Baru			480			1	Bahan Pokok	131
3	Nagari : Pandai Sikek								
	Nama Pasar : Pasar Baruah			88		1		Bahan Pokok	89
II	KECAMATAN BATIPUH	144.26	30,035	976	4	1	0		
1	Nagari : Pitalah								
	Nama Pasar : Pasar Pita Bunga			575	1			Bahan Pokok	31
2	Nagari : Batipuh Baruah								
	Nama Pasar : Pasar Kubu Kerambil			120	1			Bahan Pokok	89
3	Nagari : Batipuh Baruah								
	Nama Pasar : Pasar Ladang Laweh			51	1			Bahan Pokok	35
4	Nagari : Batipuh Baruah								

	Nama Pasar : Pasar Balai Gadang			95	1			Bahan Pokok	85
5	Nagari : Tanjung Barulak								
	Nama Pasar : Pasar Balai Kamis			135		1		Bahan Pokok	87
III	KECAMATAN BATIPUH SELATAN	82.73	10,479	80	0	1	0		
2	Nagari : Malalo								
	Nama Pasar : Pasar Malalo			80		1		Bahan Pokok	33
IV	KECAMATAN PARIANGAN	76.43	19,610	488	0	1	0		
1	Nagari : Simabur								
	Nama Pasar : Pasar Simabur			488		1		Bahan Pokok	106
V	KECAMATAN RAMBATAN	129.15	33,442	904	0	4	0		
1	Nagari : Simawang								
	Nama Pasar : Pasar Ombilin			89		1		Bahan Pokok	89
2	Nagari : Rambatan								
	Nama Pasar : Pasar Rambatan			391		1		Bahan Pokok	95
3	Nagari : Balimbing								
	Nama Pasar : Pasar Belimbing			299		1		Bahan Pokok	95
4	Nagari : III Koto								
	Nama Pasar : Pasar Turawan			125		1		Bahan Pokok	55
VI	KECAMATAN SUNGAI TARAB	71.85	22,419	1260	2	2	0		
1	Nagari : Sungai Tarab								
	Nama Pasar : Pasar sungai Tarab			750		1		Bahan Pokok	2
2	Nagari : Rao-Rao								
	Nama Pasar : Pasar Rao-Rao			380		1		Bahan Pokok	89
3	Nagari : Pasie Laweh								
	Nama Pasar : Pasar Pasie Laweh			0	1			Bahan Pokok	0
4	Nagari : Gurun								
	Nama Pasar : Pasar Gurun			130	1			Bahan Pokok	54
VII	KECAMATAN SALIMPAUNG	60.88	20,865	1106	0	3	1		
1	Nagari : Tabek Patah								

	Nama Pasar : Pasar Tabek Patah			623			1	Bahan Pokok	2
2	Nagari : Salimpaung								
	Nama Pasar : Pasar Salimpaung			300		1		Bahan Pokok	45
3	Nagari : Sumanik								
	Nama Pasar : Pasar Ahad			100		1		Bahan Pokok	110
4	Nagari : Situmbuk								
	Nama Pasar : Pasar Situmbuk			83		1		Bahan Pokok	55
VII I	KECAMATAN TANJUNG BARU	43.14	12,847	268	0	2	0		
1	Nagari : Tanjung Alam								
	Nama Pasar : Pasar Pakan Kamis			145		1		Bahan Pokok	101
2	Nagari : Barulak								
	Nama Pasar : Pasar Pakan Sabtu			123		1		Bahan Pokok	95
IX	KECAMATAN SUNGAYANG	65.45	16,982	536	0	3	0		
1	Nagari : Tanjung								
	Nama Pasar : Pasar Tanjung			200		1		Bahan Pokok	203
2	Nagari : Sungayang								
	Nama Pasar : Pasar Sungayang			273		1		Bahan Pokok	99
3	Nagari : Andaleh								
	Nama Pasar : Pasar Baruh Bukit			63		1		Bahan Pokok	8
X	KECAMATAN TANJUNG EMAS	112.05	21,790	300	0	4	0		
1	Nagari : Saruaso								
	Nama Pasar : Pasar Minggu			167		1		Bahan Pokok	78
2	Nagari : Tanjung Barulak								
	Nama Pasar : Pasar Balai Sabtu			71		1		Bahan Pokok	5
3	Nagari : Koto Tengah								
	Nama Pasar : Pasar Balai Selasa			35		1		Bahan Pokok	3
4	Nagari : Guguak Tanjung Barulak								
	Nama Pasar : Pasar Ambek			27		1		Bahan Pokok	13
XI	KECAMATAN PADANG GANTING	83.50	13,705	639	1	3	0		
1	Nagari : Padang								

	Ganting								
	Nama Pasar : Pasar Rabu			355	1			Bahan Pokok	31
2	Nagari : Atar								
	Nama Pasar : Pasar Ambek			50		1		Bahan Pokok	31
3	Nagari : Atar Taratak VIII								
	Nama Pasar : Pasar Senin			87		1		Bahan Pokok	31
4	Nagari : Atar Taratak XII								
	Nama Pasar : Pasar Baringin Ungka			147		1		Bahan Pokok	80
XII	KECAMATAN LINTAU BUO	60.22	17,646	395	0	3	0		
1	Nagari : Taluak								
	Nama Pasar : Pasar Taluak			95		1		Bahan Pokok	33
2	Nagari : Buo								
	Nama Pasar : Pasar Buo			137		1		Bahan Pokok	
3	Nagari : Tigo Jangko								
	Nama Pasar : Pasar Tigo Jangko			163		1		Bahan Pokok	95
XII I	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA	204.31	34,973	341	1	2	0		
1	Nagari : Lubuk Jantan								
	Nama Pasar : Pasar Balai Selasa			27		1		Bahan Pokok	
2	Nagari : Balai Tengah								
	Nama Pasar : Balai Tengah			160	1			Bahan Pokok	31
3	Nagari : Tanjung Bonai								
	Nama Pasar : Pasar Ranah Batu			154		1		Bahan Pokok	
XI V	KECAMATAN LIMA KAUM	50.00	35,951	1573	1	0	0		
1	Nagari : Baringin								
	Nama Pasar : Pasar serikat C Batusangkar			1573	1			Bahan Pokok	40
	JUMLAH	1,336	333,073	9,559	9	31	2		

Pendanaan merupakan faktor utama pendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, berikut dijabarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperindag 2010-2015 seperti table:

MATRIK REALISASI DAN PENDANAAN PELAYANAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2010 - 2015																
NO	URAIAN	2010 - 2015 ANGGARAN PADA TAHUN 2010 - 2015			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 2010 - 2015					SISIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2010 - 2015					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		3	4	5	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
1	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Koperasi dan UKM				153	156	157	159	161.00	153.00	153.00	144.00	178.00	178	100.00	98.08
	Jml koperasi				153	156	157	159	161.00	153.00	153.00	144.00	178.00	178	100.00	98.08
	%Koperasi aktif				73.85	75	76	77	80	75	74	82.6	87	87	101.56	98.67
	Jml anggota koperasi				30,769	30,704	30,806	31,106	31,423	30,769	30,110	30,468	32,392	33,338	100.00	98.07
	Aset				53	78	89	119	157	53	62	82	107	135	100.00	79.49
	volume Usaha				113	162	210	273	354.00	114.00	137.00	162.00	184.00	208	100.88	84.57
	SHU				4	6	7	8	9	4	5	6	7	9.5	100.00	83.33
	Modal sendiri				39	48	60	73	90	32	40	50	62	84	82.05	83.33
	Jml LKM				27	36	39	41	44	27	36	40	40	37	100.00	100.00
	Jml UKM Binaan				2,037	2,279	2,518	2,675	2,850	2,037	2,279	2,518	2,772	2909	100.00	100.00
	Berkembangnya industri Kecil dan menengah				465	492	520	540	560	496	524	565	685	639	106.67	106.50
	Jml Industri yang telah memiliki Izin (TDD)				465	492	520	540	560	496	524	565	685	639	106.67	106.50
	Jml Produk IKM yang telah memiliki Standarisasi				0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	100.00	200.00
	Jml Produk IKM yang telah memiliki label halal				11	10	10	10	10	-	-	10	32	2	-	-
	Jml Produk IKM yang telah memiliki Sertikat Haki				4	4	5	5	5	7	9	-	4	-	175.00	225.00

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan Tupoksi Dinas Koperasi Usaha Kecil Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan sesuai dengan kewenangan adalah sebagai berikut :

1. Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi.
2. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013-2014 karena masih rendahnya realisasi investasi dan daya dorong ekonomi masyarakat.
3. Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan masyarakat.
4. Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan pelaku ekonomi daerah.

Disamping tantangan yang ada terdapat beberapa peluang dalam rangka pelaksanaan pelayanan :

1. Potensi kelembagaan ekonomi masyarakat melalui koperasi serta potensi Usaha Mikro Kecil Menengah ditengah-tengah masyarakat yang bisa dikembangkan
2. Pengembangan sektor ekonomi masyarakat dibidang industri dan perdagangan
3. Potensi pasar dalam daerah dan regional.
4. Terdapatnya produk spesifik daerah yang bisa dijadikan produk unggulan serta memiliki daya saing melalui penerapan dan inovasi teknologi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

**Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2014 karena masih rendahnya realisasi investasi, dan daya dorong ekonomi masyarakat	- Rendahnya kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	- Rendahnya Daya saing produk di pasar lokal, regional dan ekspor - Faktor produksi bahan baku yang tergantung pada produk bukan sumber daya lokal - Rendahnya Kemampuan SDM pengusaha dalam proses produksi, manajemen usaha dan pengembangan pemasaran
		- Rendahnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	- Infrastruktur pasar yang masih belum layak untuk mendukung aktifitas perdagangan - Kondisi infrastruktur perhubungan dan Logistik yang menyebabkan biaya tinggi untuk produk sampai ke pusat-pusat perdangan di Nagari-Nagari - belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar : pengumpul, eceran, dan grosir
	Masih lemahnya keterkaitan antar	- Rendahnya keterkaitan sektor Industri dengan	- kualitas dan kuantitas Bahan baku produk pertanian lokal

	lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih terbatasnya kemampun penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal.	sektor pertanian	belum sesuai dengan kebutuhan sektor industri baik industri agro maupun non agro - Pengembangan industri yang belum diarahkan kepada industri berbasis sumber daya lokal/daerah
		- Rendahnya keterkaitan sektor Industri dengan sektor pariwisata	- Pengembangan industri kerajinan/ industri kreatif yang belum diarahkan untuk jadi sektor pendukung pariwisata
		- Rendahnya keterkaitan sektor Industri dengan sektor-sektor ekonomi lainnya	- Perlunya membangun integrasi/ keterkaitan dengan sektor-sektor ekonomi lain yang mendukung pengembangan industri dan perdagangan seperti informasi dan komunikasi , perdagangan, transportasi dan lainnya
	Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah	Sebahagian besar produk industri yang dihasilkan pelaku usaha belum tersertifikasi dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HAKI)	- Rendahnya pengetahuan SDM pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi produk - Kurangnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sertifikasi produk terutama produk unggulan daerah
	Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat	- Rendahnya kualitas produk - Biaya Produksi yang lebih tinggi dari produk lain yang sejenis - Kurangnya modal pengusaha meningkatkan kapasitas produksi sesuai permintaan dalam skala besar. - Kurang dikenalnya produk-produk unggulan daerah dipasar regional maupun nasional.	- Rendahnya kualitas SDM pengusaha baik dalam pengembangan produk, manajemen usaha dan perluasan pemasaran - Banyaknya produk-produk unggulan daerah yang belum tersertifikasi dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HAKI) - Kurangnya promosi dalam pengembangan pemasaran
	Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas	Masih belum memadainya kelembagaan ekonomi baik koperasi maupun UMKM dalam peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat	- Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman anggota masyarakat dalam berkoperasi - Masih lemahnya kelembagaan koperasi dalam hal pengelolaan manajemen koperasi

	perekonomian		<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi yang ada sebahagian besar merupakan koperasi yang bergerak disektor simpan pinjam dan bukan berusaha disektor riil.
	Masih terbatasnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah	Infrastruktur pasar yang kurang baik dan manajemen pengelolaan pasar yang belum baik dan memadai untuk penunjang aktifitas perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Status hak tanah lokasi pasar yang tidak merupakan aset Pemda atau Pemerintah Nagari sehingga sulit untuk proses pengembangan - Pengurus Pasar yang belum bisa menjalankan fungsinya dalam pengelolaan pasar - Anggaran Revitalisasi atau pembangunan pasar yang dianggarkan sesuai prioritas pengembangan wilayah.
	Masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas SDM pengusaha dan kelompok usaha dalam adopsi teknologi - Kurangnya akses masyarakat dan kelompok usaha terhadap lembaga pengembangan teknologi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga pengembangan teknologi dan inovasi industri yang belum dioptimalkan dalam pengembangan produk industri. - Rendahnya kualitas SDM pengusaha industri dalam mengadopsi perkembangan teknologi. - Masih kurangnya peran pemda dalam pengenalan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna kepada pengusaha industri

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH				
MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH		PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
MISI 5	Meningkatkan	- Masih rendahnya	- Rasio petugas	- Adanya bantuan

	<p>ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah</p>	<p>kesadaran dan pemahaman anggota masyarakat dalam berkoperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya kelembagaan koperasi dalam hal pengelolaan manajemen koperasi - Koperasi yang ada sebahagian besar merupakan koperasi yang bergerak disektor simpan pinjam dan bukan berusaha disektor riil. - Rendahnya kualitas SDM pengusaha/ wirausahawan baik dalam pengembangan produk, manajemen usaha dan perluasan pemasaran 	<p>dengan kelompok-kelompok masyarakat yang potensial untuk berkoperasi yang masih sangat kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepengurusan koperasi yang belum memahami dan mendorong berkembangnya koperasi karena adanya permasalahan internal dan eksternal koperasi - Kurangnya minat pengurus dan anggota koperasi untuk mengembangkan usaha sektor riil 	<p>tenaga pendamping dari Pemprov.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah koperasi yang aktif dan potensial untuk dikembangkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Daya saing produk di pasar lokal, regional dan ekspor - Banyaknya produk-produk unggulan daerah yang belum tersertifikasi dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HAKI) - Faktor produksi bahan baku yang tergantung pada produk bukan sumber daya lokal - Rendahnya Kemampuan SDM pengusaha/ pengrajin industri dalam proses produksi, manajemen usaha dan pengembangan/ diversifikasi produk serta pemasaran - Masih kurangnya peran pemda dalam pengenalan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna kepada pengusaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha yang belum terbiasa dan terlatih melaksanakan produksi - Modal usaha yang kurang karena Skala usaha IKM yang sebagian besar merupakan industri rumah tangga/ mikro - Pengusaha yang belum mengetahui potensi industri kerajinan pendukung kepariwisataan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pos pelayanan teknologi untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna - Adanya program-program bantuan modal dan pendampingan

		<p>industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan industri kerajinan/ industri kreatif yang belum diarahkan untuk jadi sektor pendukung pariwisata - Pengembangan industri yang belum diarahkan kepada industri berbasis sumber daya lokal/daerah 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur pasar yang masih belum layak untuk mendukung aktifitas perdagangan - Pengurus Pasar yang belum bisa menjalankan fungsinya secara optimal dalam pengelolaan pasar - belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar : pengumpul, eceran, dan grosir - Kurangnya promosi dalam pengembangan pemasaran produk unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Status Tanah pasar yang bukan aset pemda - Kepengurusan pasar nagari yang tidak aktif - Tidak adanya data akurat bidang perdagangan - Tidak adanya data/ legalitas produk unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya program revitalisasi pasar rakyat dari pemerintah pusat - Adanya program pelatihan manajemen pengelolaan pasar dari pemda dan pemprov. - Potensi produk daerah yang besar untuk dijadikan produk unggulan

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis			

	koperasi/ sentra di sektor			
	Meningkatnya daya saing koperasi dan			
	Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan			
	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi			
	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional			
	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi			
	Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri			
	Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi			
	Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan			
	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa			
	Meningkatnya			

	Pelayanan dan Kemudahan Berusaha			

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	koperasi berkualitas			
	Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah			
	Meningkatnya Kapasitas organisasi Dinas Koperasi, UMKM			
	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan			
	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri			
	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga			

3.5. Perumusan Isu Prioritas Atas Pelayanan Dinas Koperindag

- a. Perlunya penataan kelembagaan Koperasi untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat
- b. Perlunya peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Industri formal menjadi Usaha formal untuk meningkatkan daya saing.
- c. Perlunya peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dalam peningkatan kualitas produk, manajemen usaha, diversifikasi produk dan pengembangan pemasaran
- d. Pemenuhan standarisasi produk, pengawasan keamanan produk serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
- e. Peningkatan peran pemda dalam pengenalan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna kepada pengusaha industri
- f. Pengembangan industri kerajinan yang perlu diarahkan untuk jadi sektor pendukung pariwisata
- g. Pengembangan industri yang berbasis sumber daya lokal/daerah untuk peningkatan nilai tambah, daya tahan dan daya saing produk unggulan daerah
- h. Peningkatan kualitas pengelolaan pasar agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha
- i. Perlunya perlindungan hak konsumen dari praktek dagang yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan dijabarkan dalam Tujuan Perangkat Daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(outcome) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 dirumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diuraikan pada tabel berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH									
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Menguatnya kelembagaan Koperasi dan UMKM	Berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1 Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			2 Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi (%)	5	5	5	5	5	5
			3 Peningkatan skala usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Unit)	60	70	80	90	100	150
			4 Peningkatan Wira Usahawan Pemula (orang)	120	120	120	120	120	120
2.	Meningkatnya kontribusi sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB	1. Meningkatnya daya saing industri daerah	1 Jumlah IKM Informal menjadi IKM Formal (unit)	12	14	14	14	14	14
			2 Persentase Peningkatan Volume Usaha IKM (%)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		2. Berkembangnya perdagangan daerah	1 Jumlah pedagang informal menjadi formal (pedagang)	50	50	50	50	50	50
			2 Penambahan pasar yang Representatif	2	3	2	2	2	3
			3 Jumlah pasar nagari yang terkelola dengan baik (pasar)	4	4	4	3	3	4
3.	Meningkatkatnya kinerja dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat sistem akuntabilitas kinerja OPD	B	B	BB	A	A	A

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran, selaras dengan Visi Kabupaten Serta Misi terkait dengan kewenangan perangkat daerah disusun Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, sebagaimana tabel berikut :

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH		
MISI 5	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menguatnya kelembagaan Koperasi dan UMKM	1 Berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1 Penguatan kelembagaan dan SDM Koperasi dan UMKM	1 Peningkatan SDM Pengelolaan Koperasi 2 Peningkatan jiwa kewirausahaan pelaku usaha 3 Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM 4 Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi dan

Meningkatnya kontribusi sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB	1. Meningkatnya daya saing industri daerah	1	Peningkatan mutu produk melalui Penerapan dan inovasi teknologi tepat guna	1	Peningkatan SDM dalam penerapan teknologi tepat guna
		2	Peningkatan nilai tambah produk melalui sertifikasi, peningkatan mutu kemasan dan promosi	2	Pembinaan IKM melalui sentra-sentra industri potensial
				1	Fasilitasi sertifikasi produk IKM
				2	Fasilitasi kemasan sesuai standar
	2. Berkembangnya perdagangan daerah			3	Pengembangan pemasaran dan promosi
		1	Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	1	Fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan daerah
2		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan Peningkatan SDM dan manajemen pengelolaan pasar	1	Penambahan sarana dan prasarana pasar yang representatif	
			2	Peningkatan pemahaman manajemen dan pengelolaan keuangan pengelola pasar	
		3	Peningkatan perlindungan terhadap konsumen dalam aktifitas perdagangan	1	Peningkatan akurasi alat UTTP melalui tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal

<p>Meningkatkatnya kinerja dan kualitas pelayanan publik</p>	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2 Peningkatan jumlah Aparatur yang mengikuti diklat teknis dan administrasi 3 Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan penganggaran 4 Peningkatan kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 2 Penyediaan informasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya 3 Pengawasan peredaran barang dan jasa <p>Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>Fasilitasi diklat formal bagi Aparatur</p> <p>Penerapan peraturan perundang undangan dan penyusunan SOP penatausahaan keuangan Penerapan SOP dan Standar pelayanan OPD</p>
--	---	--	---

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk Perencanaan tahun 2016 - 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar adapun Program, kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif sebagai mana tabel berikut :

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 2016 – 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA		KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif (%)	89%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi (%)	0,20%	5	5	5	5	5	5
3	Peningkatan skala usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Unit)	n.a	60	70	80	90	100	150
4	Peningkatan Wira Usahawan Pemula (orang)	210	120	120	120	120	120	120
1	Jumlah IKM Informal menjadi IKM Formal (unit)	239	12	14	14	14	14	14
2	Persentase Peningkatan Volume Usaha IKM (%)	0.32	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	Jumlah pedagang informal menjadi formal (pedagang)	750	50	50	50	50	50	50
2	Penambahan pasar yang Representatif	28	2	3	2	2	2	3
3	Jumlah pasar nagari yang terkelola dengan baik (pasar)	20	4	4	4	3	3	4
	Predikat sistem akuntabilitas kinerja OPD	B	B	B	BB	A	A	A

3.2.1. Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dengan melihat kondisi yang dihadapi dalam perkembangan koperasi dan UMKM pada saat ini maka kondisi yang ingin dicapai untuk 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Bidang Koperasi dan UKM untuk meningkatkan peran koperasi dan UKM melalui kebijakan pengembangan usaha koperasi dan UKM dengan target yang ingin dicapai pada akhir 2021 nanti yaitu :

INDIKATOR	KONDISI AWAL (2015)	KONDISI AKHIR (2021)
Persentase koperasi aktif (%)	89% (206/229)	91.5
Peningkatan volume usaha koperasi	0.20%	PEi5
Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Unit)	56	356
jumlah UMKM yang difasilitasi dalam pengembangan usaha (Unit)	80	430
wirausahawan yang dibina (orang)	210	600

3.2.2. Sektor Industri

Pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah (IKM) perlu dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lebih difokuskan pada peningkatan daya saing IKM seperti, kualitas produksi, kemasan dan lain-lain. Kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra 2016-2021 ini adalah :

INDIKATOR	KONDISI AWAL (2015)	KONDISI AKHIR (2021)
Peningkatan jumlah IKM formal (unit)	239	321
IKM yang menerapkan teknologi tepat guna (unit)	15	33
Pengembangan IKM pada sentra potensial (sentra)	0	6
Peningkatan produk yang bersertifikat (buah)	55	95
Produk IKM yang difasilitasi menggunakan kemasan sesuai standar (produk)	20	320

3.2.3. Sektor Perdagangan

Pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah (IKM) perlu dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lebih difokuskan pada peningkatan

INDIKATOR	KONDISI AWAL (2015)	KONDISI AKHIR (2021)
Jumlah kerjasama perdagangan (dok)	-	12
Fasilitasi promosi bagi produk unggulan daerah (pameran dan pasar lelang) (kali)	6 pameran 11 pasar lelang	6/11
Jumlah pedagang yang dibina (orang)	701	701
Pengelolaan pasar nagari dengan kategori baik (pasar)	20	42
Penambahan pasar layak bagi pedagang (pasar)	28	42
Berkembangnya sarana dan prasarana pasar nagari (DED)	3	18
Meningkatnya akurasi alat ukur melalui tera-tera ulang UTTP (%)	65.15	100

BAB VII. PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) tahun 2016-2021 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan perencanaan Dinas Koperindag yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, yang akan menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan untuk masa lima tahun yang akan datang, sehingga apa yang diprogramkan dapat terwujud dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar.

Dengan dirumuskan Rencana Strategis Dinas Koperindag Kabupaten Tanah datar yang telah memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di sektor koperasi, perindustrian, dan pertambangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra dinas ini memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun kedepan yang terencana dan terkoordinasi dan harmonis.